

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor – faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua,

selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan secara merata oleh rakyat dan masih terdapat kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lain. Pada hakekatnya pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai fungsi dan peran masing – masing dalam mengisi pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat bahwa sejumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjadi solusi atas terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga belum tentu terjadi pembangunan di suatu daerah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pengertian antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang – barang dan jasa masyarakat (output), sebaliknya pembangunan bukan saja memerlukan peningkatan produksi barang dan jasa tetapi juga harus terjadi perubahan dan menjamin pembagiannya (distribusi) secara lebih merata kepada segenap lapisan masyarakat.

Tabel 1.1 PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (Juta Rupiah).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	20.689.486,29	21.465.423,27	22.191.304,61	22.724.491,30	23.856.154,64
2. Pertambangan dan penggalian	1.130.654,44	1.009.921,15	1.074.750,54	1.119.581,92	1.229.049,96
3. Industri Pengolahan	19.298.236,31	20.337.028,18	21.305.358,15	22.470.565,67	23.615.200,05
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	660.797,67	681.199,04	716.250,61	738.314,65	739.918,09
5. Bangunan	4.536.030,75	4.883.081,22	5.515.982,46	6.085.612,46	6.559.295,79
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.353.390,18	15.230.316,32	15.984.925,39	17.095.259,94	18.306.279,50
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.905.554,56	6.702.178,66	7.379.922,33	8.529.198,32	9.076.562,32
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	4.749.770,72	5.077.295,30	5.440.496,67	5.977.573,44	6.720.615,60
9. Jasa-jasa	7.481.687,64	7.942.505,43	8.288.798,46	8.876.806,68	9.609.197,33
Jumlah	78.805.608,56	83.328.948,58	87.897.791,21	93.347.404,39	99.792.273,27

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas PDRB Propinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan periode tahun 2003-2007 menunjukkan kenaikan. Sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 20.689.486,29juta, dan meningkat terus sampai tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 23.856.154,64juta. Diikuti dengan kontribusi kedua terbesar yang menjadi penyumbang adalah sektor industri yaitu sebesar Rp. 19.298.236,31 juta pada tahun 2003 dan meningkat terus hingga tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 23.615.200,05juta. Dan pada kontribusi ketiga sebagai penyumbang di PDRB ini adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar Rp. 14.353.390,18 juta pada tahun 2003 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 18.306.279,50 juta.

Tabel 1.2. Distribusi Persentase Sumatera Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (Persen).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	26,25	25,76	25,25	24,33	23,91
2. Pertambangan dan penggalian	1,43	1,21	1,22	1,20	1,23
3. Industri Pengolahan	24,49	24,41	24,24	24,08	23,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,84	0,82	0,81	0,79	0,74
5. Bangunan	5,76	5,86	6,28	6,52	6,57

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	18,21	18,28	18,19	18,32	18,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,49	8,04	8,40	8,85	9,10
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	6,03	6,09	6,19	6,40	6,73
9. Jasa-jasa	9,49	9,53	9,43	9,51	9,63
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas sektor pertanian di Propinsi Sumatera Utara pada periode 2003 – 2007 merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 26,45 persen pada tahun 2003, mengalami penurunan sampai tahun 2007 yaitu sebesar 23,91 persen dan diikuti oleh penyumbang terbesar kedua adalah sektor industri penggalian yaitu dari 24,49 persen, pada tahun 2003, mengalami penurunan sampai tahun 2007, yaitu sebesar 23,66 persen. Penyumbang ketiga yang terbesar adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 18,21 persen pada tahun 2003, mengalami kenaikan sampai tahun 2007, yaitu sebesar 18,42 persen.

Tabel 1.3. PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007(Jutaan Rupiah).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	1.039.823,10	1.058.968,92	1.075.670,85	1.207.279,42	1.261.082,99
2. Pertambangan dan Penggalian	7.489,99	8.114,59	8.803,55	8870,82	9.360,06
3. Industri Pengolahan	637.010,05	639.260,78	650.214,00	653.401,28	662.397,61
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.929,95	2.055,13	2.255,01	2.328,51	2.465,28
5. Bangunan	131.377,51	151.667,92	170.499,90	179.441,16	187.016,92
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	334.758,48	340.043,94	353.012,24	346.034,74	377.939,61
7. Pengangkutan dan Komunikasi	38.774,57	47.063,00	53.821,93	57.174,34	58.781,08
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	7.012,92	7.998,12	9.174,97	11.240,10	11.719,56
9. Jasa-jasa	225.663,39	245.064,42	261.416,95	268.842,81	283.839,65
Jumlah	2.423.839,98	2.500.236,82	2.584.869,41	2.734.613,53	2.854.602,74

Sumber: BPS, Tapanuli Selatan Dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 1.3, PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan dan atas dasar harga konstan periode tahun 2003-2007 menunjukkan kenaikan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2003, yaitu sebesar Rp. 1.039.823,10 juta, dan meningkat terus sampai tahun 2007 sebesar Rp. 1.261.682,99 juta. Kontribusi kedua yang terbesar adalah sektor industri, yaitu Rp. 637.010,05 juta pada tahun 2003, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi Rp. 662.397,61 juta pada tahun 2007. Kontribusi ketiga adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, yaitu sebesar Rp. 334.758,48 juta pada tahun 2003, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp. 377.939,61 juta pada tahun 2007.

Tabel 1.4. Distribusi Persentase Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (Persen).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	42,90	42,35	41,61	44,15	44,18
2. Pertambangan dan penggalian	0,30	0,32	0,34	0,32	0,33
3. Industri Pengolahan	26,28	25,57	25,15	23,89	23,20
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
5. Bangunan	5,42	6,07	6,60	6,56	6,55
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13,81	13,60	13,66	12,65	13,24
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,60	1,88	2,08	2,09	2,06
8. Bank dan Lembaga. Keuangan Lainnya	0,29	0,32	0,35	0,41	0,41
9. Jasa-jasa	9,31	9,80	10,11	9,83	9,94
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, **Tapanuli Selatan Dalam Angka 2008**

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2003 – 2007 pertanian merupakan distribusi terbesar yang terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 42,90 persen mengalami penurunan pada tahun 2005, yaitu sebesar 41,61 persen, sampai tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 44,18 persen, diikuti oleh distribusi terbesar kedua adalah sektor industri yaitu sebesar 26,28 persen pada tahun 2003 dan mengalami penurunan sebesar 23,20 persen pada tahun 2007, distribusi ketiga yang terbesar adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 13,81 persen pada tahun 2003, dan mengalami

penurunan sebesar 12,65 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 naik menjadi 13,24 persen.

Tabel 1.5.PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	2.870.168,07	2.965.901,57	3.084.710,36	3.205.531,90	3.349.276,48
2. Pertambangan dan penggalian	640.032,50	480.742,18	462.579,80	408.776,74	427.308,56
3. Industri Pengolahan	570.601,35	602.180,91	629.001,60	653.487,14	685.817,78
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	17.451,63	18.048,23	18.938,27	19.956,31	21.114,36
5. Bangunan	126.935,19	131.391,24	135.381,97	141.587,93	147.468,48
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	743.592,20	809.547,57	854.688,00	904.537,49	966.217,89
7. Pengangkutan dan Komunikasi	129.477,80	132.670,51	134.294,07	136.988,18	141.439,49
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	68.601,87	74.893,38	80.910,38	87.821,11	97.589,91
9. Jasa-jasa	310.032,14	316.786,44	323.534,17	330.340,45	341.785,88
Jumlah	5.476.892,22	5.532.162,02	5.724.038,64	5.889.027,25	6.178.018,83

Sumber:
BPS,
Langkat
Dalam
Angka
2008

B

erdas

arkan Tabel 1.5, PDRB Kabupaten Langkat atas dasar harga konstan periode tahun 2003-2007 menunjukkan kenaikan. Di Kabupaten Langkat sektor pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2003, yaitu sebesar Rp. 2.870.168,07 juta, dan meningkat terus sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 3.349.276,48 juta. Kontribusi kedua yang terbesar adalah sektor perdagangan, yaitu Rp. 743.592,20 juta pada tahun 2003, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi Rp. 966.217,89 juta pada tahun 2007. Kontribusi ke tiga adalah sektor industri, yaitu sebesar Rp. 570.601,35 juta pada tahun 2003, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp. 685.817,78 juta pada tahun 2007.

Tabel 1.6.Distribusi Persentase Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2007 (Persen).

Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	52,41	53,61	53,98	54,43	54,21
2. Pertambangan dan penggalian	11,69	8,69	8,08	6,94	6,92
3. Industri Pengolahan	10,42	10,89	10,99	11,10	11,10
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34
5. Bangunan	2,32	2,38	2,37	2,40	2,39
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13,58	14,63	14,93	15,36	15,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,36	2,40	2,35	2,33	2,29

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	1,25	1,35	1,41	1,49	1,58
9. Jasa-jasa	5,60	5,73	5,65	5,61	5,53
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS,
**Langkat Dalam
Angka 2008**

Berda

sarkan Tabel 1.6. tersebut di atas sektor pertanian di Kabupaten Langkat pada periode 2003 – 2007 sektor pertanian merupakan distribusi terbesar yang terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 52,41 persen pada tahun 2003, dan naik terus sampai tahun 2006, yaitu sebesar 54,43 persen, pada tahun 2007 mengalami penurunan, yaitu sebesar 54,21 persen dan diikuti oleh distribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 13,58 persen pada tahun 2003, dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar 15,64 persen. Distribusi ketiga yang terbesar adalah sektor industri yaitu sebesar 10,42 persen pada tahun 2003, dan naik secara terus menerus hingga tahun 2007, yaitu sebesar 11,10 persen.

Selain menurut lapangan usaha, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara juga dapat ditinjau dari sudut produksi, yaitu: Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor Tersier.

Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan terbesar di sektor ekonomi. Sektor ini meliputi lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Sektor Sekunder merupakan sektor ekonomi yang lebih bertumpu pada pengintegrasian sumber daya manusia, modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari hasil sektor primer. Sektor ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan bangunan.

Sektor Tersier merupakan sektor ekonomi yang bertumpu nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia dan tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk Jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa.

Tabel 1.7. PDRB Sumatera Utara Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (jutaan rupiah).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	21.820.140,73	22.475.344,42	23.266.055,15	22.844.073,22	25.085.205,6
1. Pertanian	20.689.486,29	21.465.423,27	22.191.304,61	22.724.491,30	23.856.154,64
2. Pertambangan dan Penggalian	1.130.654,44	1.009.921,15	1.074.750,54	1.119.581,92	1.229.049,96
Sektor Sekunder	24.495.064,73	25.901.308,44	27.537.601,22	29.294.492,78	30.914.413,93
3. Industri Pengolahan	19.298.236,31	20.337.028,18	21.305.358,15	22.470.565,67	23.615.200,05
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	660.797,67	681.199,04	716.250,61	738.314,65	739.918,09
5. Bangunan	4.536.030,75	4.883.081,22	5.515.982,46	8.876.806,68	6.559.295,79
Sektor Tersier	32490.403,1	34.952.295,71	37.094.134,85	40.208.838,38	43.792.654,75
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.353.390,18	15.230.316,32	8.288.798,46	17.095.259,94	9.609.197,33
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.905.554,56	6.702.178,66	7.379.922,33	8.529.198,32	9.076.562,32
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	4.749.770,72	5.077.295,30	5.440.496,67	5.977.573,44	6.720.615,60
9. Jasa – jasa	7.481.687,64	7.942.505,43	15.984.925,39	6.085.612,46	18.306.279,50

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2008 (data diolah)

Dari Tabel 1.7 di atas maka dapat dilihat bahwa PDRB di Propinsi Sumatera Utara pada sektor primer pada tahun 2005 sebesar Rp. 23.266.055,15 juta, pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar Rp. 22.844.073,22 juta, meningkat terus dari tahun ke tahun sampai tahun 2003, yaitu sebesar Rp. 27.839.908,04 juta. Pada sektor sekunder dapat dilihat pada tahun 2005 sebesar Rp. 27.537.601,22 juta, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 32.613.074,16 juta. Di sektor tersier dilihat pada tahun 2005

sebesar Rp. 37.094.134,85 juta, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai tahun 2009 yaitu sebesar Rp.50.361.838,59 juta.

Tabel 1.8. Distribusi Persentase Sumatera Utara Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (persen).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	27,68	26,97	26,47	25,53	25,14
1. Pertanian	26,25	25,76	25,25	24,33	23,91
2. Pertambangan dan Penggalian	1,43	1,21	1,22	1,20	1,23
Sektor Sekunder	31,09	31,09	31,33	31,39	30,97
3. Industri Pengolahan	24,49	24,41	24,24	24,08	23,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,84	0,82	0,81	0,79	0,74
5. Bangunan	5,76	5,86	6,28	6,52	6,57
Sektor Tersier	41,22	41,94	42,21	43,08	43,88
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	18,21	18,28	18,19	18,32	18,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,49	8,04	8,40	8,85	9,10
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	6,03	6,09	6,19	6,40	6,73
9. Jasa – jasa	9,49	9,53	9,43	9,51	9,63

Sumber: BPS, **Sumatera Utara Dalam Angka 2008**(data diolah)

Dari Tabel 1.8 di atas maka dapat dilihat bahwa distribusi per sentase di Sumatera Utara pada sektor primer pada tahun 2003 sebesar 27,68 persen, mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai tahun 2007, yaitu sebesar 24,97 persen. Pada sektor sekunder dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar 31,09 persen, mengalami kenaikan sampai tahun 2006, yaitu sebesar 31,39 persen, dan pada tahun 2007 turun menjadi 30,97 persen. Di sektor tersier dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar 41,22 persen, mengalami kenaikan sampai tahun 2007, yaitu sebesar 43,88 persen.

Tabel 1.9.PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (Jutaan rupiah).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	1.047.313,09	1.067.083,51	1.084.474,4	1.145.745,24	1.271.043,05
1. Pertanian	1.039.823,10	1.058.968,92	1.075.670,85	1.136.674,42	1.261.682,99
2. Pertambangan dan Penggalian	7.489,99	8.114,59	8.803,55	9.070,82	9.360,06
Sektor Sekunder	770.317,5	792.983,83	822.968,91	841.167,95	851.879,81
3. Industri Pengolahan	637.010,05	639.260,78	650.214,00	659.401,28	662.397,61
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.929,95	2.055,13	2.255,01	2.325,51	2.465,28
5. Bangunan	131.377,51	151.667,92	170.499,90	179.441,16	187.016,92
Sektor Tersier	606.209,36	632.171,36	677.426,09	683.292,34	732.279,9
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	334.758,48	340.043,94	353.012,24	346.034,74	377.939,61
7. Pengangkutan dan Komunikasi	38.774,57	47.063,00	53.821,93	57.174,34	58.781,08
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	7.012,92	7.998,12	9.174,97	11.240,45	11.719,56
9. Jasa – jasa	225.663,39	245.064,42	261.416,95	268.842,81	283.839,65

Sumber: BPS, **Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2008**(data diolah)

Dari Tabel 1.9 di atas maka dapat dilihat bahwa PDRB di Kabupaten Tapanuli Selatan pada sektor primer pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.047.313,09 juta, meningkat terus sampai tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 1.271.043,05 juta. Pada sektor sekunder dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar Rp. 770.317,5 juta, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 851.879,81 juta. Di sektor tersier dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar Rp. 606.209,39 juta, mengalami kenaikan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.732.279,9 juta.

Tabel 1.10. Distribusi Persentase Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (persen).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
--------	------	------	------	------	------

Sektor Primer	43,2	42,67	41,95	44,47	44,51
1. Pertanian	42,90	42,35	41,61	44,15	44,18
2. Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,32	0,34	0,32	0,33
Sektor Sekunder	31,78	32,26	31,84	30,54	29,84
3. Industri Pengolahan	26,28	25,57	25,15	23,89	23,20
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
5. Bangunan	5,42	6,07	6,60	6,56	6,55
Sektor Tersier	25,01	25,6	26,2	24,98	25,54
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13,81	13,60	13,66	12,65	13,24
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,60	1,88	2,08	2,09	2,06
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,29	0,32	0,35	0,41	0,41
9. Jasa – jasa	9,31	9,80	10,11	9,83	9,83

Sumber: BPS, **Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2008** (data diolah)

Dari Tabel 1.10 di atas maka dapat dilihat bahwa distribusi per sentase di Kabupaten Tapanuli Selatan pada sektor primer pada tahun 2003 sebesar 43,2 persen, meningkat terus sampai tahun 2007, yaitu sebesar 44,51 persen. Pada sektor sekunder dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar 31,78 persen, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar 29,84 persen. Di sektor tersier dapat dilihat pada tahun 2003, sebesar 25,01 persen, mengalami penurunan pada tahun 2006 yaitu sebesar 24,98 persen. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan yaitu sebesar 25,54 persen.

Tabel 1.11. PDRB Kabupaten Langkat Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (jutaan rupiah).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	3.510.200,57	3.446.643,75	3.547.290,16	3.614.308,68	3.776.585,04
1. Pertanian	2.870.168,07	2.965.901,57	3.084.710,36	3.205.531,90	3.349.276,48
2. Pertambangan dan Penggalian	640.032,50	480.742,18	462.579,80	408.776,74	427.308,56

Sektor Sekunder	714.448,17	751.620,38	783.321,84	815.031,38	835.400,62
3. Industri Pengolahan	570.601,35				
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	17.451,63	602.180,91	629.001,60	653.487,14	685.817,78
5. Bangunan	126.935,19	18.048,23	18.938,27	19.956,31	21.114,36
		131.391,24	135.381,97	141.587,93	147.468,48
Sektor Tersier	1.251.704,01	1.333.897,9	1.393.426,62	1.459.687,23	1.547.033,17
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	743.592,20	809.547,57	854.688,00	904.537,49	966.217,89
7. Pengangkutan dan Komunikasi	129.477,80	132.670,51	134.294,07	136.988,18	141.439,49
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	68.601,87	74.893,38	80.910,38	87.821,11	97.589,91
9. Jasa – jasa	310.032,14	316.786,44	323.534,17	330.340,45	341.785,88

Sumber: BPS, **Kabupaten Langkat Dalam Angka 2010**(data diolah)

Dari Tabel 1.11 di atas maka dapat dilihat bahwa PDRB di Kabupaten Langkat pada sektor primer tahun 2003 sebesar Rp. 3.510.200,57 juta, meningkat terus sampai tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 3.776.585,04 juta. Pada sektor sekunder dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar Rp. 714.448,17 juta, mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 835.400,62 juta. Di sektor tersier dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.251.704,01 juta, mengalami kenaikan sampai tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 1.547.033,17 juta.

Tabel 1.12 Distribusi Persentase Kabupaten Langkat Menurut Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (persen).

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Primer	64,1	62,3	62,06	61,37	61,13
1. Pertanian	52,41	53,61	53,98	54,43	54,21
2. Pertambangan dan Penggalian	11,69	8,69	8,08	6,94	6,92
Sektor Sekunder	13,06	13,6	13,69	13,84	13,83
3. Industri Pengolahan	10,42	10,89	10,99	11,10	11,10
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34
5. Bangunan	2,32	2,38	2,37	2,40	2,39

Sektor Tersier	22,79	24,11	24,34	24,79	25,04
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13,58	14,63	14,93	15,36	15,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,36	2,40	2,35	2,33	2,29
8. Bank dan lembaga Keuangan Lainnya	1,25	1,35	1,41	1,49	1,58
9. Jasa – jasa	5,60	5,73	5,65	5,61	5,53

Sumber: BPS, **Kabupaten Langkat Dalam Angka 2008** (data diolah)

Dari Tabel 1.12 di atas maka dapat dilihat bahwa di Kabupaten Langkat pada sektor primer tahun 2003 sebesar 64,1 persen, mengalami penurunan sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar 61,13 persen. Pada sektor sekunder dapat dilihat tahun 2003 sebesar Rp. 13,06 persen, mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2007, yaitu sebesar 13,83 persen. Di sektor tersier dapat dilihat pada tahun 2003 sebesar 22,79 persen, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2007, yaitu sebesar 25,04 persen.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik membandingkan pertumbuhan ekonomi kedua Kabupaten ini dengan Sumatera Utara dan melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi dengan judul **“Tipologi Sektoral Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini. Selain itu perumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana tipologi sektoral di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara?

2. a. Bagaimana tipologi sektoral sektor primer di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana tipologi sektoral sektor sekunder di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana tipologi sektoral sektor tersier di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana tipologi sektoral di Kabupaten Tapanuli selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan provinsi Sumatera Utara.
2. a. Mengetahui bagaimana tipologi sektoral sektor primer di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara.
- b. Mengetahui bagaimana tipologi sektoral sektor sekunder di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara.
- c. Mengetahui bagaimana tipologi sektoral sektor tersier di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara.

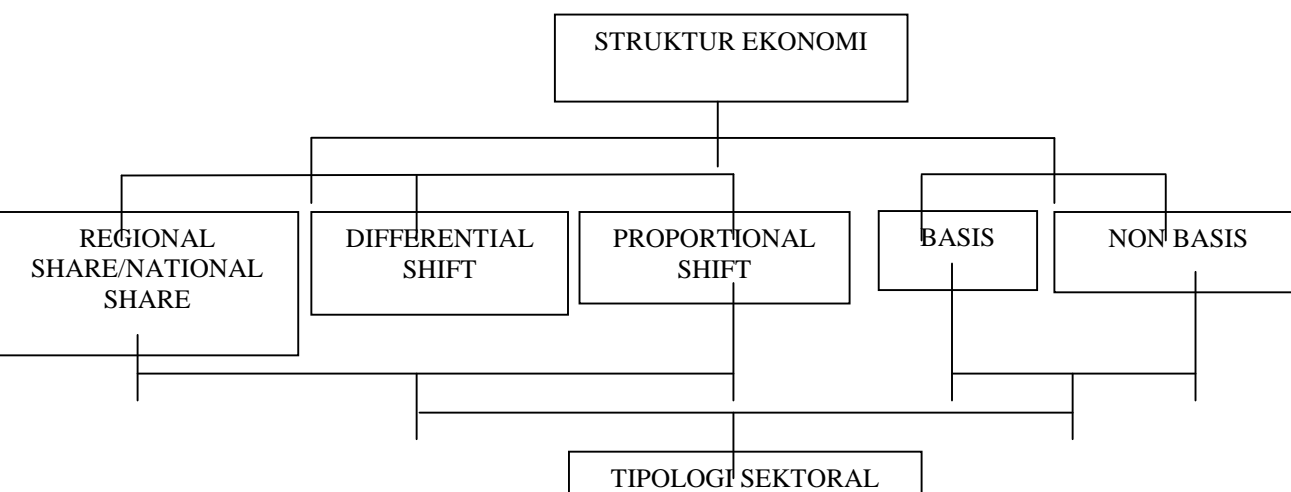
1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikiut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menjadi Mahasiswa Fakultas Ekonomi HKBP-Nommensen.
2. Sebagai bahan studi, perbandingan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dan peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik sama.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah maupun pengambil kebijakan daerah Kabupaten, dalam usaha untuk memaksimalkan faktor – faktor andalan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

1.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penguraian sederhana tentang dasar pemikiran (teori) yang digunakan untuk membantu menjelaskan apa yang hendak diteliti.



Gambar 1 :Kerangka Pemikiran Tipologi Sektor Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Suatu perekonomian dikatakan bertumbuh, jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat atau dengan kata lain terjadi perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial suatu negara. “Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standard hidup masyarakat”.¹⁾ Suatu negara kadang kala mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kadang juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Tujuan utama dari penghitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian semakin membaik atautkah sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁾

Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat mempengaruhi hal-hal berikut; (1) Tingkat Kesejahteraan, (2) Kesempatan

¹⁾ Asfia Murni, **Ekonomika Makro**, Bandung: Refika Aditama, 2006 hal. 173.

²⁾ Sadono Sukirno, **Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Kebijakan**, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hal. 9.

Kerja, (3) Distribusi Pendapatan. Masyarakat dikatakan semakin sejahtera jika setidaknya-tidaknya *output* nasional per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut meningkat apabila pertumbuhan GNP atau GDP per kapita melebihi dari pertumbuhan penduduk. Misalkan penambahan penduduk suatu negara adalah 2% per tahun, maka pertumbuhan GNP atau GDP semestinya lebih besar dari 2% supaya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Terjadinya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya GNP atau GDP riil. Kondisi ini jelas sangat membuka kesempatan kerja bagi seluruh faktor produksi. Oleh karena manusia adalah salah satu faktor produksi (tenaga kerja) terpenting dalam proses produksi, maka kesempatan kerja akan meningkat apabila output nasional meningkat.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diharapkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih merata. Upaya-upaya pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (b) memperluas kesempatan kerja, (c) meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi semakin besar pula.

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Kestabilan politik, kebijakan ekonomi daerah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat.
5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Ad.1. Tanah dan Kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara daerah akan dapat mempermudah upaya untuk mengembangkan perekonomiannya, terutama di masa awal proses pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam mengembangkan perekonomian baru tersebut terdapat banyak sekali hambatan seperti: kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, kekurangan pengetahuan para pengusaha dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi apabila suatu negara memiliki kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan. Kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha dan investor dari negara lebih yang lebih maju untuk mengusahakan dan mengolah kekayaan alam tersebut. Sehingga segala hambatan yang ada (modal, tenaga-tenaga ahli dan teknologi) akan mereka bawa dari luar yang akan digunakan untuk mengelola kekayaan alam yang tersedia secara efisien dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bergantung kepada banyaknya kekayaan alam suatu negara. Negara benua Asia yang lain seperti: Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada kekayaan alam. Negara tersebut berhasil memaksimalkan sektor industri yang efisien, yang sanggup bersaing di pasar internasional.

Ad.2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Pertambahan penduduk dapat menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat terhadap perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut kemungkinan akan menambah produksi dan luas pasar. Perlu diketahui

bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk. Oleh karena itu, luasnya kegiatan ekonomi juga sangat bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana penambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita akan menurun. Dengan demikian pertumbuhan penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat semakin merosot.

Dampak pertumbuhan penduduk yang dihadapi adalah kemajuan ekonomi yang belum tinggi tetapi telah mengalami masalah kelebihan penduduk, bahkan pertumbuhan penduduk yang terjadi jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Masalah tersebut akan menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran.

Ad.3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Perkembangan teknologi akan menambah produktivitas barang-barang modal sampai pada perkembangan yang maksimal. Barang-barang modal yang bertambah harus diikuti dengan perkembangan tingkat teknologi. Barang-barang modal yang bertambah jumlahnya, dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang rendah.

Perkembangan teknologi tersebut akan menimbulkan beberapa efek-efek positif. Efek positif dari kemajuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang, Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.**
- 2. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.**
- 3. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.³⁾**

³⁾ Sadono Sukirno, **Makroekonomi: Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 hal. 431.

Ad.4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat dapat memberikan peranan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun pendapat beberapa ahli ekonomi menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan masyarakat ada yang menerima pembangunan, tetapi tidak sedikit masyarakat yang menolak pembangunan yang berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Selain itu juga dalam sistem sosial, dimana tanah sebagian besar masih dimiliki oleh tuan-tuan tanah sehingga pembangunan ekonomi tidak akan mencapai pada tingkat yang diharapkan. Apabila dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Perubahan dalam sikap masyarakat sangat penting diciptakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Ad.5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Adam Smith menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas menghalangi pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Oleh karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut Meier (1995) bahwa :

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.⁴⁾

Dalam hal ini yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Pembangunan ekonomi dimaksud lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan. Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan per kapita riil, disini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tersedianya barang-barang modal dan tingkat teknologi menjadi peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

2.4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Pengembangan metode untuk menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat

⁴⁾ Mudrajad Kuncoro, **Ekonomika Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan**, Edisi Keempat, Yogyakarta: STIM YKPN, 2006, hal. 17.

dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu digunakan formula berikut:

$$g = \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} \times 100\%$$

dimana, g adalah tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi, GDP_1 (Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto) adalah pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam suatu tahun (tahun 1), dan GDP_0 adalah pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya:

- a. **Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah *nodal* (berdasarkan fungsinya).**
- b. **Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.**
- c. **Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian daerah lebih terbuka jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.**
- d. **Bagi negara sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan umum, data yang terbatas itu pun banyak yang kurang akurat dan terkadang relatif sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah.⁵⁾**

2.4.1 Teori Klasik

Penggunaan modal tersebut ditekankan untuk meningkatkan penawaran setinggi-tingginya, penawaran yang tinggi akan diikuti oleh permintaan yang tinggi pula (*supply creates its own demand*). Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, karena penawaran yang tinggi tidak

⁵⁾ Darman Prianto Purba, **Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten Simalungun**, Skripsi S₁ (Tidak Diterbitkan) Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010, hal 23.

selalu diikuti oleh permintaan yang tinggi pula. Sehingga mengakibatkan timbulnya kelebihan produksi, pengangguran, dan deflasi. Hal ini berbeda dengan asumsi klasik: (1) perekonomian dalam keadaan full unemployment, (2) perekonomian dalam dua sektor (konsumen dan produsen), (3) tidak ada campur tangan pemerintah, dan (4) pembangunan ekonomi tergantung pada mekanisme pasar.

2.4.2. Model Basis Ekspor (*Export-Base Model*)

“Model ini mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.”⁶ Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan.

Teori basis ekspor adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana. Aktifitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yakni aktifitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktifitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang

⁶ Sjafrizal, **Ekonomi Regional**. Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama, Padang: Baduouse Media: 2008, hal. 87.

berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Menurut Robinson Tarigan tingkat kebasisan suatu produk dapat dijenjangkan sebagai berikut:

1. **Jangkauan pemasarannya hanya pada beberapa desa tetangga.**
2. **Jangkauan pemasarannya hanya pada beberapa wilayah kecamatan.**
3. **Jangkauan pemasarannya hanya pada wilayah satu provinsi.**
4. **Jangkauan pemasarannya mencakup beberapa wilayah provinsi.**
5. **Jangkauan pemasarannya mencakup sebagian besar wilayah ekonomi nasional dan ekspor.**
6. **Jangkauan pemasarannya pada hampir seluruh wilayah ekonomi nasional dan merupakan ekspor tradisional.⁷**

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/ jasa keluar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah disebut kegiatan basis. Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan servis atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti servis disebut saja sektor non basis. Sektor non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat.

2.5. Metode Location Quotient (LQ)

Metode ini adalah salah satu cara bagaimana memilah antara kegiatan basis atau non basis. Dalam metode ini banyak variabel yang dapat diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Jika yang digunakan adalah data lapangan kerja, maka apabila $LQ > 1$ berarti bahwa porsi lapangan kerja sektor tersebut di wilayah analisis adalah lebih besar dibandingkan dengan porsi lapangan kerja untuk sektor yang sama secara nasional. Artinya sektor i di wilayah analisis secara proporsional dapat menyediakan lapangan kerja melebihi porsi sektor i secara nasional. $LQ > 1$ memberikan indikasi bahwa sektor

⁷Robinson Tarigan, **Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi**. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2005, hal. 44.

tersebut adalah basis atau unggulan, sedangkan apabila $LQ < 1$ berarti sektor tersebut adalah non basis atau bukan unggulan. Sedangkan apabila $LQ = 1$ berarti daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu.

2.6. Pengembangan Sektor Potensial

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan. Berdasarkan potensi sumberdaya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin.

Di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah :

- 1. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan kompartif (*comparative advantage*). Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan ekonom-akademis.**
- 2. Konsep delapan wahana transformasi teknologi dan industri yang dikemukakan oleh mantan menteri riset dan teknologi (Habibie), yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara simultan.**
- 3. Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir. Konsep ini merupakan konsep Menteri Perindustrian.⁸⁾**

⁸⁾Darman Prianto Purba, **Op. Cit**, hal. 27.

2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Tipologi sektoral di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat beragam ada yang masuk di tipologi II, yang artinya sektor ini merupakan sektor basis dan pertumbuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kabupaten Langkat lebih cepat dibandingkan dengan propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya lambat. Ada juga yang termasuk ke tipologi III, yang artinya yaitu merupakan sektor basis dan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi Sumatera Utara dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya cepat. Ada juga yang termasuk tipologi IV, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lebih lambat dibanding propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya juga lambat. Ada juga tipologi V, yaitu sektor tersebut adalah sektor non basis dan pertumbuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat lebih cepat dibanding pertumbuhan di tingkat propinsi Sumatera Utara dan di propinsi Sumatera Utara sendiri pertumbuhannya juga cepat

2. a. Sektor primer di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan tipologi II, yaitu sektor ini merupakan sektor basis dan pertumbuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih cepat dibandingkan dengan propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya lambat. Sementara di Kabupaten Langkat sektor primer merupakan tipologi II, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lebih cepat

dibanding propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya lambat.

- b. Sektor sekunder di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan tipologi III, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lebih lambat dibanding propinsi Sumatera Utara dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya cepat. Di Kabupaten Langkat, sektor sekunder merupakan tipologi IV, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lebih lambat dibanding propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya juga lambat.
- c. Sektor tersier di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan tipologi I, yaitu merupakan sektor basis dengan pertumbuhan lebih cepat dibanding propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya juga cepat, sementara di Kabupaten Langkat sektor tersier merupakan tipologi IV, yaitu yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lebih lambat dibanding propinsi Sumatera Utara, dan di propinsi Sumatera Utara pertumbuhannya juga lambat.